

HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI

E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEKAN CHAIRIL ANWAR

Kerja Sama FIB Universitas Jember, HISKI Jember, dan ATL Jember

Editor: Heru S.P. Saputra, Novi Anoeграjekti, Titik Maslikatin, Zahratul Umniyyah, L. Dyah Purwita Wardani SWW

Vol. 1, No. 1, Oktober 2020

ISBN: 978-623-7973-08-9

Halaman 639—650

URL: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031>

Penerbit: Jember University Press

PERKEMBANGAN ENVIRONMENTALISME DI JAWA PASCAKOLONIAL

Nawiyanto

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

snawiyanto@gmail.com

Abstrak

Pada pertengahan abad ke-20, kekhawatiran akan krisis ekologis berkembang sebagai akibat dari perubahan ekonomi dan sosial berskala besar di Jawa. Berdasar pada sumber-sumber sejarah, tulisan ini membahas perkembangan environmentalisme di Jawa pascakolonial. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi munculnya environmentalisme konservasionis yang menekankan perlindungan alam dan munculnya environmentalisme populis. Hasil kajian menunjukkan bahwa environmentalisme pascakolonial di Jawa menunjukkan kesinambungan historis dan perubahan dari akar kolonialnya. Gerakan lingkungan yang lebih menonjol dari tahun 1970-an dibandingkan dengan dekade-dekade awal disebabkan oleh semakin banyaknya kelompok dengan kepedulian yang kuat tentang lingkungan dan penciptaan ruang partisipatif yang disediakan oleh pemerintah untuk organisasi non-pemerintah. Kelompok lingkungan memainkan peran penting dalam mengartikulasikan masalah lingkungan dan dengan membawa masalah baru menjadi perhatian publik dalam pencarian jawaban dan solusi untuk masalah tersebut.

Kata kunci: environmentalisme konservasionis, environmentalisme populer, pembangunan, Jawa postkolonial

PENDAHULUAN

Banyak studi tentang environmentalisme di Jawa pascakolonial sebagian besar berfokus pada era Orde Baru. Sebuah karya Tim Presidium (1997) melihat gerakan penghijauan yang dipimpin oleh negara selama periode Orde Baru, tetapi tanpa mempertimbangkan peran aktor di luar negara. Juga berfokus pada periode Orde Baru, sebuah artikel oleh Cribb (1990) membahas hubungan dinamis antara pembangunan ekonomi, kelompok penekan dan kontrol birokrasi atas masalah polusi. Sementara itu, sebuah artikel oleh MacAndrews (1994) meneliti penggunaan masalah lingkungan oleh pemerintah dan kelompok sosial untuk tujuan dan agenda mereka sendiri. Lucas dan Djati (2000) menyajikan pembahasan yang kaya tentang dinamika politik polusi di Provinsi Jawa Timur.

Terlepas dari kontribusi penting mereka, berbagai kajian tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan pentingnya dekade sebelumnya dalam pembentukan gerakan lingkungan di Jawa pascakolonial. Dalam hubungan ini, tulisan ini berupaya menguraikan pentingnya dekade-dekade sebelumnya dalam pengembangan

environmentalisme di Jawa pasca-kolonial, bagaimana gerakan lingkungan di Jawa pasca-kolonial selama era Soekarno dan Suharto telah berubah dan atau tetap sama fitur-fiturnya dan alasan di baliknya. Periode 1950-an menyaksikan pembentukan kembali environmentalisme konservasionis dan pengembangan environmentalisme berbasis negara, yang tetap memainkan peran dominan hingga 1980-an. Namun, sejak akhir 1970-an, environmentalisme populis juga mulai muncul di Indonesia. Sejak awal 1980-an, ada konsolidasi di antara berbagai kelompok aktivis lingkungan yang membuat lingkungan populer menjadi semakin kuat dan independen dari negara.

Kerangka konseptual yang menginspirasi argumentasi artikel ini terutama berasal dari environmentalisme. Menurut Ulate (2015), ada lima kategori environmentalisme: 1) environmentalisme konservasionis, 2) ekologi kritis, 3) environmentalisme govermentalis (berbasis negara), 4) gerakan petani yang berorientasi lingkungan dan organisasi adat, dan 5) environmentalisme populer. Di antara lima kategori ini, tiga relevan dan berharga untuk pembahasan di sini, environmentalisme konservasionis, environmentalisme berbasis negara, dan environmentalisme populis, sementara dua kategori lainnya tidak begitu penting digunakan di sini. Environmentalisme konservasionis dikaitkan dengan ide melindungi alam dari efek buruk dari ekspansi ekonomi dan pengembangan demografis. Fitur utamanya adalah penyediaan lahan untuk tujuan konservasi. Environmentalisme yang berasal dari negara mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sipil dalam masalah lingkungan di bawah kepemimpinan lembaga-lembaga negara. Sementara itu, environmentalisme populis terkait dengan dua fitur utama, basis komunitas dan masalah lingkungan lokal (Ulate, 2015).

Kesadaran akan masalah lingkungan adalah hasil dari pembacaan yang objektif oleh agen, yang memainkan peran kunci dalam mengubah masalah lingkungan menjadi masalah publik dengan tujuan untuk menemukan solusi yang diperlukan. Agen dapat berasal dari berbagai latar belakang seperti ilmuwan, media, atau kelompok aktivis lingkungan, bertindak sebagai "pembuat klaim", yang mendesak kebenaran atas klaim mereka dan urgensi respons politik untuk mengatasi masalah (Hannigan, 2006).

METODE

Artikel ini menggunakan berbagai bahan sumber, termasuk majalah dan surat kabar kontemporer, laporan organisasi, dan publikasi lainnya. Publikasi berharga untuk diskusi konservasi di Jawa selama era kolonial dan dekade awal kemerdekaan adalah *Tectona* (kemudian, *Rimba Indonesia*), *Insinjur Indonesia*, *Almanak Pertanian*, dan *Gema Perhutani*. Artikel dan buku yang ditulis oleh pejabat kehutanan yang bekerja untuk Dinas Kehutanan dari pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Indonesia yang baru didirikan juga memberikan informasi yang berguna tentang konservasi pasca-kolonial awal. Sementara itu, untuk berita dan laporan tentang perkembangan sejaman dari konservasi alam dan isu lingkungan, *Majalah Ozon dan Tanah Air* menjadi sumber yang berguna. Sumber untuk artikel tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat di Jawa seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Perpustakaan WALHI,

keduanya di Jakarta. Sebagian bahan berasal dari Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Perpustakaan Departemen Pertanian di Bogor Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Environmentalisme konservasionis dan governmental

Environmentalisme di Jawa pascakolonial muncul dari warisan kolonial. Awalnya mengambil bentuk konservasi lingkungan. Perhatian untuk konservasi di Jawa kolonial hampir secara eksklusif ditemukan di antara orang Eropa. Di antara 18 anggota dewan Asosiasi Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam, misalnya, mereka adalah orang Eropa dan hanya satu anggota dengan latar belakang bangsawan Jawa (Nederlandsch-Indische Vereeniging, 1914). Bagi kaum nasionalis Indonesia, konservasi alam tidak pernah disuarakan karena fokus utama mereka adalah masalah sosial-ekonomi dan politik. Dalam pandangan mereka, konservasi alam sering dianggap sebagai bagian dari penindasan kolonial, yang membatasi hak penduduk asli untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan Belanda (Boomgaard 1999; Nawiyanto 2014).

Kepedulian terhadap konservasi praktis tidak ada selama pendudukan Jepang (1942-1945) dan revolusi kemerdekaan (1945-1949). Perusakan hutan, sebaliknya, berlanjut. Sepanjang tahun 1943 dan 1944 permintaan kayu meningkat dua kali lipat karena jumlah besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri (Peluso, 1992; Soepardi, 1950; Soepardi, 1974). Kayu yang berharga digunakan dalam pembuatan tong dan juga digunakan untuk bangunan dan tujuan pertahanan (Fernandes, 1946). Banyak tempat di Jawa sebagian kehilangan hutannya karena kebijakan Jepang untuk meningkatkan produksi pangan (Pelzer, 1982). Pemberian lahan hutan untuk keperluan pertanian mencapai 4.428 hektar dan melibatkan 8.242 orang (Soepardi, 1974).

Pada saat kemerdekaan, kerusakan hutan dan kawasan konservasi terus berlanjut. Beberapa orang menafsirkan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk mengambil tindakan apa pun, termasuk tindakan membahayakan lingkungan, yang sebelumnya dilindungi oleh hukum kolonial (Soepardi, 1954; Pelzer, 1982). Ketika mengunjungi cagar alam Depok, misalnya, Van der Meulen (1982) menemukan bahwa semua pohon di situs tersebut telah ditebang. Kerusakan hutan di seluruh Jawa diperkirakan mencapai 537.700 hektar pada tahun 1950 (Soedarma, 1959). Proporsi hutan di pulau Jawa menyusut hingga 12 persen dari permukaan tanahnya, jauh dari panduan 30 persen yang ideal untuk menjaga fungsi lingkungan (Hardjodarsono *et al.*, 1986).

Di tengah kondisi yang memburuk, tahun 1950-an melihat kesadaran yang meningkat akan krisis lingkungan. Fenomena ini ditemukan terutama di antara mereka yang bekerja di Djawatan Kehutanan, Djawatan Pertanian, dan Kebun Raya Bogor. Kepala Djawatan Pertanian, Soeprapto (1954) memperingatkan bahwa ribuan hektar tanah di kediaman Surakarta telah hancur dan menjadi tandus karena erosi. Ponto (1954) menegaskan bahwa bencana yang disebabkan oleh erosi memiliki dampak yang

jauh lebih besar daripada krisis politik dan Menteri Pertanian, Moh. Sardjan (1953) menyebutkan negara-negara yang hancur oleh erosi bencana. Sementara itu, Hoogerwerf (1953) memperingatkan pengeringan mata air, sungai, dan ancaman kepunahan satwa liar yang berkelanjutan. Tulisan-tulisan mereka membentuk bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi kritis dan perlunya jalan keluar dari krisis lingkungan.

Semakin banyak orang Indonesia mulai terlibat dalam konservasi. Perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran dalam pemerintahan dan masyarakat. Proses dekolonisasi telah secara drastis mengurangi kehadiran orang-orang Eropa dan meninggalkan tanggung jawab untuk menangani masalah konservasi kepada orang Indonesia. Para rimbawan Indonesia yang bekerja sebelumnya untuk lembaga-lembaga kolonial yang terkait dengan konservasi adalah yang pertama merasakan seruan alarm untuk melanjutkan upaya konservasi. Sementara itu, semakin banyak orang Indonesia yang menikmati pelatihan dan pendidikan formal di universitas-universitas di bidang kehutanan yang diadakan di Bogor dan Yogyakarta dari tahun 1950-an (Almanak, 1953) menciptakan generasi baru yang terpapar pada isu-isu konservasi dan lingkungan.

Keterlibatan Indonesia yang lebih aktif dalam konservasi di tahun 1950-an mungkin sebagian mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia. Ini terkait erat dengan perselisihan atas Papua Barat antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Keengganan Belanda untuk menyerahkan Papua Barat mendorong para konservasionis Indonesia untuk membuat rekomendasi yang menyerukan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan konservasi di Papua Barat (Arnscheidt, 2009). Penangkapan dan pembunuhan spesies burung cendrawasih, yang secara lokal dikenal sebagai burung Cenderawasih, merupakan tantangan serius bagi para konservasionis Indonesia yang bekerja untuk perlindungan alam dan satwa liar (Hardjodarsono et al., 1986). Masalahnya muncul sejak era kolonial Belanda yang melihat perburuan komersial yang luas dan perdagangan satwa liar ilegal untuk pasar ekspor (Yuwono, 2013).

Meskipun ada unsur anti-kolonial, cara-cara di mana tantangan lingkungan ditanggapi sebagian menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu kolonial. Setelah menyatakan “perang melawan erosi dan tanah tandus” pada tahun 1951 (Sardjan, 1953), pemerintah mulai menjalankan program rehabilitasi tanah dengan menanam pohon. Ada dua kegiatan utama yang dijalankan di bawah program penghijauan dan penghijauan. Kedua kegiatan membentuk program yang dipandu dengan peran sentral pemerintah. Perbedaannya terkait dengan lokasi penanaman. Penghijauan dilakukan di lahan hutan di bawah yurisdiksi Djawatan Kehutanan, sementara itu, program penghijauan dilakukan di lahan milik pribadi (Hardjodarsono et al., 1986).

Kegiatan itu dipandang sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan masalah erosi dan lahan kritis. Namun, langkah-langkah itu terlalu kecil untuk memiliki efek signifikan pada masalah yang begitu besar dan rumit. Menarik pelajaran dari Jepang dan Amerika Serikat, serta mempertimbangkan eskalasi masalah, dan ditambah dengan menjamurnya bencana banjir, implementasi aforestasi ditingkatkan. Perbaikan didasarkan pada rekomendasi dari Kongres Kehutanan Indonesia Pertama pada tahun

1956. Hal ini termasuk kebutuhan untuk memobilisasi massa, memperluas ruang lingkup kegiatan, dan implementasi yang lebih teratur. Hasilnya adalah peluncuran program penghijauan nasional, ditetapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1961. Dari tahun 1961 hingga 1968, program minggu penghijauan difokuskan di Jawa (Tim Presidium, 1997). Fokus yang berkelanjutan di Jawa hingga 1968 jelas menunjukkan keseriusan erosi dan deforestasi di pulau itu. Hanya pada tahun-tahun berikutnya, ia bergeser ke pulau-pulau lain.

Di bidang konservasi alam dan satwa liar, ada kemiripan besar dengan era kolonial Belanda. Ini mungkin terlihat dari fakta bahwa cagar alam dan cagar alam yang diciptakan Belanda terus ada selama era pasca kolonial. Kerangka hukum baru kemudian dikeluarkan untuk melindungi mereka terutama dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agraria No. 110 / VIII / 1957. Beberapa situs konservasi diperluas. Sebagai contoh, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Ujung Kulon didukung dengan memasukkan kawasan hutan Gunung Honje seluas 10.000 hektar sebagai zona penyangga untuk mengamankan kelangsungan hidup badak. Selain itu, situs baru ditambahkan pada daftar konservasi, menghasilkan peningkatan dari 61 situs yang diwarisi dari Belanda menjadi 68 pada tahun 1968 (Basjarudin, 1968). Di antara yang baru adalah Gunung Jagad, Telagawarna, Yanlappa dan Leuweung Sancang (Hardjodarsono et al. 1986).

Setidaknya ada dua alasan utama untuk kelangsungan sejarah yang ada. Pertama, bagian dari aktivis lingkungan dalam dekade awal kemerdekaan adalah tokoh-tokoh yang sama yang aktif terlibat dalam bidang yang sama selama periode kolonial. Beberapa dari mereka adalah orang Eropa yang terus bekerja di Indonesia. Nama yang terkenal adalah Andries Hoogerwerf, seorang naturalis Belanda dan konservasionis yang bekerja di Kebun Raya Bogor hingga 1957. Hoogerwerf adalah Kepala Divisi Perlindungan Alam dan Perburuan, Kebun Raya Bogor. Dia mungkin penulis yang paling produktif menerbitkan artikel tentang konservasi alam dan satwa liar pada 1950-an (Hoogerwerf, 1953; Hoogerwerf, 1954; Hoogerwerf, 1974). Kedua, sebagian besar masalah lingkungan pada dekade awal pascakolonial pada dasarnya tetap sama. Jawa mengalami masalah kronis kerusakan hutan, erosi tanah, dan perburuan ilegal.

Tetapi ada fitur yang berbeda yang mulai muncul pada 1950-an, mengikuti perubahan rezim. Semakin banyak orang Indonesia mulai memainkan peran dalam pelestarian lingkungan. Tokoh penting adalah Soepardi, seorang rimbawan Indonesia, yang bekerja untuk Bagian Planologi Hutan dan yang menulis sejumlah buku berharga tentang hutan Jawa pada 1950-an. Tokoh kunci lainnya adalah Koesnoto Setijodiwirijo dan Koesnadi Partosatmoko. Setijodiwirijo adalah Direktur Kebun Raya Bogor dan salah satu artikelnya yang diterbitkan berjudul "Masalah Perlindungan Alam di Indonesia" (*Insinjur Indonesia*, 1957). Sementara itu, Partosatmoko menerbitkan beberapa artikel antara lain, "Makna perburuan sekarang" (*Rimba Indonesia*, 1953) dan "Tugas Perlindungan Alam / Margasatwa, Departemen Kehutanan" (*Rimba Indonesia*, 1955). Dengan menggunakan retorika malapetaka dalam tulisan-tulisan mereka, angka-

angka ini membunyikan bel yang memperingatkan krisis yang berkembang mengancam lingkungan Jawa dan penduduknya.

Terlepas dari perkembangan domestik, kemunculan environmentalisme di Jawa pada 1950-an juga disebabkan oleh faktor eksternal. Pada kongres yang diadakan di Brussels pada tahun 1950, Uni Internasional untuk Perlindungan Alam dan Sumber Daya Alam (IUCN) menyatakan keprihatinan internasional yang berkembang tentang status spesies yang terancam. Kunjungan Wakil Presiden IUCN, H.J. Coolidge, yang juga mewakili Asosiasi Sains Pasifik dan Komite Tetap Konservasi Pasifik, meningkatkan kekhawatiran global tentang situasi yang mengkhawatirkan dari spesies permainan liar tertentu di negara ini (Partosatmoko, 1953). Dorongan itu semakin kuat sekitar pertengahan 1960-an setelah IUCN meluncurkan Proyek Konservasi Asia Tenggara dan dirumuskan dalam pertemuannya, yang diadakan di Nairobi pada 1963 (Talbot dan Talbot, 1968).

Untuk memperbaiki kondisi, perubahan penting dilakukan dengan manajemen konservasi oleh. Pada tahun 1968 diumumkan bahwa sejumlah kawasan konservasi di Jawa akan dibuka untuk pariwisata (Basjarudin, 1968). Perubahan manajemen bahkan melangkah lebih jauh. Sekitar dua puluh tahun kemudian dalam Kongres Dunia Ketiga tentang Taman Nasional yang diadakan di Bali pada tahun 1982, Menteri Pertanian Indonesia, Ir. Soedarsono Hadisapoetro, menyatakan pembentukan taman nasional. Butuh sepuluh tahun untuk menerapkan rencana tersebut dan taman nasional mulai muncul pada tahun 1992. Ada 12 taman nasional yang didirikan di Jawa. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan kepentingan konservasi dan pembangunan dengan mengakomodasi fungsi pendidikan, penelitian, dan rekreasi (Sumarwoto, 2004).

Dengan asal-usul dapat dilacak ke era kolonial Belanda, environmentalisme postkolonial Jawa muncul kembali dan secara bertahap mengambil jalan baru. Ciri yang paling berbeda dari environmentalisme postkolonial adalah environmentalisme populis, yang praktis tidak ada selama periode kolonial Belanda dan bagian selanjutnya akan membahas masalah ini.

Environmentalisme Populis

Bentuk environmentalisme ini mulai muncul pada tahun 1970-an dengan meningkatnya kekhawatiran tentang polusi industri. Memang benar bahwa masalahnya sudah ada sejak Hindia Belanda dalam bentuk polusi mikroba dan artisan (Nagtegaal, 1995). Terlepas dari kenyataan bahwa polusi terus tumbuh sebagai akibat dari industrialisasi kolonial, polusi di Jawa tetap menjadi masalah kecil. Isu ini kurang populer daripada deforestasi dan masalah erosi, yang menikmati reputasi yang berkembang. Ketika para pendiri Indonesia menyiapkan UUD 1945, kekhawatiran tentang erosi dan banjir yang terkait dengan deforestasi diperdebatkan secara serius (Arnscheidt, 2009), tetapi tidak untuk masalah polusi, yang tampaknya tetap tidak disentuh pada tahun 1950-an dan 1960-an.

Terlepas dari kontribusinya terhadap ekonomi, pertumbuhan industri di Jawa dari tahun 1970-an juga mengancam lingkungan dan populasi. Polusi Sungai Brantas di

Surabaya oleh perusahaan Korea PT Miwon telah menjadi berita hangat di harian Surabaya Post pada Juli 1975 (Lucas et al. 2000). Demikian pula, *Majalah Tempo* melaporkan pencemaran Kali Surabaya oleh PT Pakabaya, PT Jayabaya, PT Spin do, dan pabrik-pabrik PT Surabaya Wire di Kabupaten Driyorejo, dengan judul menyentak perhatian, "Surabaya dalam Krisis, Krisis Air Tercemar" (*Tempo*, 24 September 1977) Sekitar tiga minggu sebelumnya, surat kabar *Surabaya Post* (31 Agustus 1977) melaporkan, "Empat pabrik berhenti lagi". *Majalah Tempo* (Maret 1979) dan surat kabar *Suara Merdeka* (7 Juni 1979) melaporkan kasus pencemaran oleh PT Semarang Diamond Chemicals (Aditjondro, 1979). Media dan jurnalis memainkan peran penting dalam perkembangan environmentalisme populis (Tjahjuni et al., 2004)

Adopsi pencemaran sebagai fokus lingkungan tidak terlepas dari peran Kelompok Sepuluh. Minat terhadap masalah polusi menjadi lebih kuat dengan pecahnya dua insiden lainnya yang terkait dengan polusi. Insiden pertama adalah bocornya laporan rahasia oleh Badan Atom Nasional (BATAN) ke kantor berita Antara tentang tingginya kadar merkuri di perairan Teluk Jakarta. Informasi ini mendorong Kelompok Sepuluh untuk melakukan observasi lapangan dan uji laboratorium pada sampel air laut. Pengecekan medis menunjukkan bahwa para nelayan Teluk Jakarta menderita penyakit Minamata karena kontaminasi merkuri. Kejadian kedua adalah protes yang dilakukan oleh petani di Majalengka (Jawa Barat) kepada PT United Chemical Industry karena kontaminasi tanah mereka (Aditjondro, 2003).

Terlepas dari peran jurnalis dan media dalam mempopulerkannya, kemunculan environmentalisme populis juga tidak terlepas dari kelompok lain. Jawa tahun 1970-an ditandai oleh meningkatnya jumlah kelompok non-pemerintah dengan kepedulian yang kuat terhadap lingkungan. Di antara mereka adalah mahasiswa yang menikmati lingkungan alam. Hal ini dipelopori oleh kelompok Mapala Universitas Indonesia (UI) di Jakarta dan Kelompok Wanadri di Bandung Jawa Barat. Pada tahun 1970 Mapala UI dibentuk sebagai forum aktivis mahasiswa di Fakultas Sastra, dengan Soe Hok Gie sebagai salah satu pemimpinnya (Wicaksana, 2014). Juga bagian dari tren di tahun 1970-an, banyak ilmuwan Indonesia memasuki arena environmentalisme dengan bergabung pada pusat-pusat studi lingkungan, yang mulai menjamur sejak akhir 1970-an.

Perkembangan menarik lainnya yang terjadi di Jawa adalah keterlibatan seniman dalam meningkatkan kepedulian lingkungan melalui karya-karya mereka. Taufik Ismail, seorang penyair terkenal menyuarakan keprihatinan atas perusakan hutan dalam satu puisi yang dibacanya di Taman Ismail Marzuki di Jakarta pada 6 Agustus 1971. Sekelompok musisi dari Bandung, Bimbo, mempopulerkan masalah lingkungan dan cinta alam melalui lagu-lagu mereka. Beberapa fotografer bergabung dalam menyuarakan perlunya kepedulian lingkungan di antara orang Indonesia melalui karya fotografi. Mereka memajang karya-karya mereka kepada publik dengan mengadakan pameran publik dan kontes foto bertema lingkungan yang diadakan di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 28 Oktober 1977 (Aditjondro, 2003).

Pada Oktober 1980, diprakarsai oleh Kelompok Sepuluh, pertemuan nasional pertama LSM lingkungan yang diadakan di Universitas Indonesia di Jakarta. Diumumkan bahwa sejumlah besar organisasi non-pemerintah di Jawa mengkonsolidasikan diri mereka dengan membangun lobi lingkungan hidup Indonesia (WALHI). Pertemuan nasional LSM dihadiri oleh 130 delegasi yang mewakili 78 organisasi. Sebagai direktur eksekutif WALHI Ir. Erna Witoelar terpilih (Soerjani 2000; Witoelar 2000), yang juga merupakan salah satu anggota inisiator pertemuan di Jakarta (Noeradi 2000).

Mengakomodasi sejumlah besar kelompok lingkungan, WALHI diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam membangun jaringan nasional. Selama lebih dari satu dekade, hubungan antara WALHI dan pemerintah relatif harmonis. Emil Salim tampaknya telah memainkan peran penting dengan terampil dalam menjaga WALHI untuk fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial, daripada urusan politik (Hafild, 2000). Dukungan pemerintah, terutama oleh Emil Salim dan pelayanannya kepada WALHI, diberikan dalam berbagai bentuk termasuk fasilitas dan dana. Pada tahun 1983, misalnya, Emil Salim bersama dengan 21 anggota terkemuka lainnya, termasuk ekonom terkemuka Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, membentuk Dana Mitra Lingkungan (DML). Ini adalah yayasan penggalangan dana dengan target donor utama dari pelaku bisnis untuk menutupi biaya operasional WALHI (Noeradi, 2000). Sumitro Djojohadikusumo adalah ketua pertama Dewan Pengawas (Djojohadikoesoemo, 2000).

Namun, sejak 1994 hubungan antara kedua pihak menjadi lebih konfrontatif. Pergeseran ini menjadi jelas dengan pengajuan berbagai tuntutan hukum oleh WALHI terhadap pemerintah, seperti kasus PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara dan kasus pengalihan Dana Reboisasi (Reboisasi) senilai 500 juta Rupiah ke industri pesawat terbang Indonesia. (IPTN). WALHI juga meluncurkan kampanye terbuka menentang proyek pemerintah terkait Kedungombo di Jawa Tengah dan Proyek PET satu juta hektar (Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar) di Kalimantan (Hafild, 2000; Situmorang, 2013).

Dengan kasus-kasus di atas, WALHI memasuki posisi bertabrakan dengan pemerintah. WALHI dan organisasi lingkungan lainnya sering melihat masalah lingkungan dengan pertimbangan khusus. Namun, pemerintah sering menghadapi dilema karena harus bergerak dalam batas kepentingan perkembangan ekonomi makro dalam agenda. Pemerintah sering berada dalam posisi yang canggung ketika memutuskan prioritas antara perlindungan lingkungan, kepentingan investasi dan ekonomi secara umum. Pilihan-pilihan itu seringkali menimbulkan dilema yang membuat pemerintah sering dikritik sebagai tidak tegas dan tidak konsisten dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan.

SIMPULAN

Kesadaran akan isu-isu lingkungan pada masa-masa pascakolonial tumbuh dari kombinasi berbagai faktor dan tumbuh secara tak terpisahkan. Pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan membawa perubahan besar-besaran dalam di Jawa dalam bentuk

deforestasi dan konversi hutan. Staf Djawatan Kehutanan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan dan kebutuhan akan konservasi alam dan satwa liar. Selain faktor-faktor internal, perkembangan environmentalisme konservasionis pada tahun 1950-an dan 1960-an tidak terlepas dari keprihatinan organisasi lingkungan internasional yang khawatir akan hilangnya spesies dan rusaknya lingkungan di Jawa. Kasus Papua Barat pada 1960-an menambah dimensi nasionalis ke dalam environmentalisme di Jawa pascakolonial. Melindungi lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bangsa sebagai negara merdeka.

Terlepas dari keterlibatan yang lebih aktif oleh rakyat Indonesia, fitur lainnya menandai ciri yang berbeda dalam lingkungan pasca-kolonial, dengan perhatian utama terhadap masalah polusi. Masalah lingkungan dari limbah pabrik, penebangan dan jurnalisme menandai munculnya environmentalisme populis. Pada tahun 1970-an polusi mulai tumbuh menjadi berbagai masalah bagi gerakan lingkungan. Perkembangan ini tidak terlepas dari industrialisasi yang terjadi di Jawa selama Orde Baru. Kehadiran pabrik yang beroperasi di tepi sungai telah menjadi masalah pencemaran air yang membahayakan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Aktivis lingkungan yang berasal dari organisasi non-pemerintah, universitas, dan media, serta para korban polusi, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan krisis lingkungan, dan mengubah polusi menjadi masalah publik, yang membutuhkan solusi politik. Kelompok-kelompok lingkungan merupakan bagian penting dalam menyelesaikan masalah baik dengan mengidentifikasi sumber polusi, pelakunya, dan dengan mendorong langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Era kemerdekaan melihat basis dukungan yang semakin luas dari environmentalisme di Jawa. Dalam dua dekade pertama, para pendukung environmentalisme sebagian besar adalah individu yang telah aktif di lapangan sejak masa kolonial. Mereka juga umumnya adalah tokoh-tokoh yang berada dalam atau dekat dengan lingkaran kekuasaan, terutama organ-organ di bawah naungan Kementerian Pertanian, khususnya, yang berurusan dengan kehutanan. Dengan karakteristiknya, ia membentuk kurang lebih gerakan lingkungan kelembagaan. Dari tahun 1970-an, para pendukung gerakan mulai memasukkan berbagai elemen yang berasal dari luar birokrasi pemerintah, seperti mahasiswa, kelompok studi lingkungan, seniman dan lembaga non-pemerintah. Perkembangan ini mewakili munculnya gerakan lingkungan sukarela, dengan basis dukungan di luar batas kelas. Fitur ini juga menandai berakhirnya peran dominan pemerintah dan dimulainya era baru gerakan lingkungan di Jawa yang beroperasi dengan dua motor LSM, aktivis, dan pemerintah. Kemampuan para aktivis dalam gerakan lingkungan untuk melindungi lingkungan menjadi lebih efektif. Namun demikian, harus diakui bahwa tantangan baru juga muncul. Kinerja kedua motor mesin perlu disinergikan dan agar lebih serasi dan efektif dalam melindungi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G.Y. 1979. Industriawan dan Petani Tambak: Kisah Polusi di Dukuh Tapak, Semarang Barat. *Prisma* 7(8) : 66-81.
- Aditjondro, G.Y. 2003. *Pola-pola Gerakan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 412.
- Almanak. 1953. Pendidikan dan Kursus. *Almanak Pertanian*, 109-127. Djakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian. 391.
- Arnscheid, J. 2009. *Debating Nature Conservation: Policy, Law and Practice in Indonesia, a Discourse Analysis of History and Present*. Leiden: Leiden University Press. 470.
- Basjaruddin, H. 1968. Recent development in the field of national park, nature reserve and natural areas. *Rimba Indonesia*. 13(1-4) : 12-29.
- Boomgaard, P. 1999. Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in late-colonial Indonesia. *Environment and History*. 5(3) : 257-292.
- Cribb, R. 1990. The Politics of Pollution Control in Indonesia. *Asian Survey*. 30: 1123-1135.
- Djojohadikusumo, S. 2000. Teknokrat cemerlang, patriot sejati. In 70 Tahun Emil Salim, *Revolusi Berhenti Hari Minggu*, ed. Noeradi, W., 68-71. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 418.
- Fernandes, D. 1946. Het boschwezen gedurende de Japansche bezetting. *Economic Weekblad voor Nederlandsch Indie*. 8(12): 57-58.
- Hafild, E. 2000. Lugu, polos, demokrat sejati. In 70 tahun Emil Salim, *revolusi berhenti hari minggu*, ed. Noeradi, W., 257-265. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 418.
- Hannigan, J. 2006. *Environmental sociology*. New York: Routledge. 194.
- Hardjodarsono, S and Pramodiby, R.I.S. 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia Periode tahun 1942-1983*. Vol. 2-3. Jakarta: Departemen Kehutanan. 184.
- Hoogerwerf, A. 1953. Perlindungan alam dan pemburuan di Indonesia. In *Almanak Pertanian 1953*, 285-293. Djakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian. 391.
- Hoogerwerf, A. 1954. Perlindungan alam dan pemburuan di Indonesia. In *Almanak Pertanian 1954*, 96-199. Djakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian. 478.
- Hoogerwerf, A. 1974. Report on a visit to wildlife reserves in East Java, Indonesia, August to November 1971. Austerlitz: Netherlands Commission for International Nature Protection. 51.
- Hoogerwerf, A. 1948. Het wildreservaat Baloeran. *Tectona*. 38: 33-49.
- Lucas, A and Djati, A.W. 2000. The dog is dead so throw it in the river: environmental politics and water pollution in Indonesia, An East Java case study. Clayton: Monash Asia Institute.152.
- MacAndrews, C. 1994. Politics of the Environment in Indonesia. *Asian Survey* 34: 369-380.

- Nagtegaal, L. 1995. Urban Pollution in Java, 1600-1850. In *Issues in Urban Development: Case Studies from Indonesia*, ed. Nash, P.J.M., 9-30. Leiden: CWNS. 293.
- Nawiyanto. 2014. Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial. *Paramita*. 24(1): 31-46.
- Nederlandsch Indische Vereeniging. 1914. *Nederlandsch-indische Vereeniging tot Natuurbescherming: eerste jaarverslag over 1912-1913*. Batavia: G. Kolff. 67.
- Noeradi, W. 2000. Angkatan '30 yang Terus Berjuang. In *70 Tahun Emil Salim, Revolusi Berhenti hari Minggu*, ed. Noeradi, W. 188-200. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 418.
- Partosatmoko, K. 1953. Arti Perburuan Sekarang. *Rimba Indonesia*. 2(10-12): 405-412.
- Partosatmoko, K. 1955. Tugas Perlindungan Alam/ Margasatwa Djawatan Kehutanan. *Rimba Indonesia*. 4 (3-6): 193-201.
- Peluso, N.L. 1992. Rich forests, poor people: resource control and resistance in Java. Berkeley: University of California Press. 336.
- Pelzer, K.J. 1982. Peranan Manusia Mengubah Wajah Alam Asia Tenggara. In *Ekologi pedesaan*, ed. Sajogyo, 1-22. Jakarta: CV Rajawali. 348.
- Ponto. 1954. Pemakaian dan Pemeliharaan Tanah. In *Almanak Pertanian 1954*, 321-338. Djakarta: Badan Penerbit Almanak Pertanian. 478.
- Sardjan, M. 1953. Kedudukan Pertanian dalam Ekonomi Indonesia dan Kemungkinan2nja. In *Almanak Pertanian*, 28-40. Djakarta: Badan Penerbit Almanak Pertanian. 391.
- Setijodiwirijo. K. 1957. Masalah Perlindungan alam di Indonesia. *Insinjur Indonesia*. 4(17-18): 4-12.
- Situmorang, A.W. 2013. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia 1968-2011*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 503.
- Soedarma. 1959. Bentjana Alam. *Suara Rimbawan* 7(8): 44-48.
- Soepardi. 1974. *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman*, bagian B. Jakarta: Perum Perhutani. 104.
- Soepardi. 1950. *Hutan Reboisasi-industri*. Djakarta: Balai Pustaka. 95.
- Soepardi. 1954. *Hutan Reboisasi Mempertinggi Kemakmuran*. Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K. 139.
- Soeprapto. 1954. Dua tahun Gerakan Terassering dalam Karesidenn Surakarta. *Teknik Pertanian*. 3: 329-337.
- Soerjani. 2000. Ekonom Tenar, Pakar Lingkungan. In *70 tahun Emil Salim, Revolusi Berhenti Hari Minggu*, ed. Noeradi, W., 159-163. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 418.
- Surabaya Post. 1977. Empat Pabrik Lagi distop. 31 August 1977.
- Talbot, L.M. and Talbot, M.H., 1968. Editors' introduction. *IUCN Publications New Series*. 10: 15-17.
- Tempo. 1977. Surabaya Geger Kepati, Gegernya Air Kena Polusi, September 24 1977.
- Tim Presidium. 1997. 35 Tahun Penghijauan di Indonesia. Jakarta: Presidium Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam. 141.

- Tim Tanah Air. 2005. Menyemai Benih Perjuangan Lingkungan. Tanah Air. 12: 6-11.
- Tjahjuni, D.I. et al. 2004. Trimarjono di antara rakyat Jawa Timur. Surabaya: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 260.
- Ulate, A.C. 2015. Forest, water, and struggle: environmental movements in Costarica. In Handbook of social movements across Latin America, ed. Almeida and Ulate, 255-271. Dordrecht. 376.
- Van der Meulen, G.F. 1982. Hidupku dan Pekerjaanku: Jalan menuju Metode Biologi. In Ekologi Pedesaan, ed. Sajogyo, 29-94. Jakarta: CV Rajawali.
- Wicaksana, A.W. 2014. Soe Hok Gie tak Pernah mati. Jakarta: Octopus. 211.
- Yuwono, H. 2013. Sejarah Konservasi Alam di Indonesia. Sintang: Balai Taman Nasional Danau Sentarum. 172.